

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/PMK.010/2022

TENTANG

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT DAFTAR RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022

Format Daftar Rincian Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung
Pemerintah Tahun Anggaran 2022:

DAFTAR RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pengusaha Kena Pajak : (1)

NPWP : (2)

Masa Pajak/Tahun Pajak : (3)

Jumlah unit kendaraan bermotor tertentu yang diserahkan unit (4)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu	Rp (5)
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang	Rp (6)
Jumlah PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP)	Rp (7)
Jumlah PPnBM yang Dipungut	Rp (8)

Dengan Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu sebagai berikut: (9)

No	Tipe	Varian	Isi Silinder	Nomor Rangka	Kode HS	DPP	PPN	PPnBM DTP	PPnBM yang Dipungut
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Jumlah									

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., (10)

(11)

..... (12)

Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022:

- (1) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak sesuai pelaporan.
- (4) Diisi dengan jumlah unit kendaraan bermotor tertentu yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Diisi dengan jumlah Rupiah DPP atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (6) Diisi dengan jumlah Rupiah PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (7) Diisi dengan jumlah Rupiah PPnBM terutang yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (8) Diisi dengan jumlah Rupiah PPnBM terutang yang tidak Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dan harus dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (9) Tabel daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor tertentu.
Kolom [1] : Diisi dengan nomor urut.
Kolom [2] : Diisi dengan tipe kendaraan bermotor tertentu.
Kolom [3] : Diisi dengan varian kendaraan bermotor tertentu.
Kolom [4] : Diisi dengan besar isi silinder kendaraan bermotor tertentu.
Kolom [5] : Diisi dengan nomor rangka kendaraan bermotor tertentu.
Kolom [6] : Diisi dengan kode HS kendaraan bermotor tertentu.
Kolom [7] : Diisi dengan nilai DPP dalam satuan rupiah.
Kolom [8] : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan rupiah.
Kolom [9] : Diisi dengan nilai PPnBM terutang yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dalam satuan rupiah.
Kolom [10] : Diisi dengan nilai PPnBM terutang yang tidak Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dan harus dipungut dalam satuan rupiah.

- (10) Diisi dengan tanggal laporan.
 - (11) Diisi tanda tangan dan cap Pengusaha Kena Pajak atau Pengurus.
 - (12) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak atau Pengurus.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

